



Menavigasi Badai Minilateralisme di Indo-Pasifik: Implikasi AUKUS dan QUAD terhadap Sentralitas ASEAN dalam Perspektif Neorealisme dan Realisme Neoklasik

¹Alviandra Akbar

¹Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama

¹Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Email: alviandra@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Desember 2024

Revised

21 Desember 2024

Accepted

01 Januari 2025

Kata Kunci: AUKUS, QUAD, Sentralitas ASEAN, Minilateralisme, Neorealisme, Realisme Neoklasik, Dilema Keamanan, Indo-Pasifik.

Keywords: AUKUS, QUAD, ASEAN Centrality, Minilateralism, Neorealism, Neoclassical Realism, Security Dilemma, Indo-Pacific.

Abstrak

Kebangkitan pakta keamanan minilateral seperti AUKUS dan QUAD di kawasan Indo-Pasifik menghadirkan disrupsi mendasar terhadap Sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi strategis AUKUS dan QUAD terhadap otonomi strategis ASEAN serta menjelaskan dinamika fragmentasi respons negara anggotanya. Mengintegrasikan kerangka Neorealisme struktural (perimbangan kekuatan dan dilema keamanan) dan Realisme Neoklasik (variabel intervensi domestik), penelitian kualitatif-eksplanatori ini berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, minilateralisme merupakan tindakan penyeimbangan keras (*hard external balancing*) AS dan sekutunya terhadap asertivitas Tiongkok, mencerminkan kekecewaan atas lambannya mekanisme konsensus inklusif ASEAN. Kedua, formasi minilateral ini memperparah fenomena *security dilemma* yang memicu polarisasi internal ASEAN antara negara penjaga netralitas (Indonesia dan Malaysia), negara pengklaim yang menyambut penangkal militer (Filipina), serta negara yang terkunci dalam subordinasi ekonomi Beijing (Kamboja dan Laos). Ketiga, sentralitas ASEAN mengalami marginalisasi fungsional, tereduksi menjadi forum dialog normatif sementara gravitasi penangkalan militer riil berpindah ke format minilateral. Studi ini menyimpulkan bahwa penyelamatan sentralitas ASEAN menuntut operasionalisasi konkret ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang didukung fleksibilitas kelembagaan seperti mekanisme ASEAN Minus X.

Abstract

The rise of minilateral security pacts such as AUKUS and the QUAD in the Indo-Pacific poses fundamental disruptions to ASEAN Centrality within the regional security architecture. This study analyzes the strategic implications of AUKUS and QUAD on ASEAN's strategic autonomy and explains the internal fragmentation among its member states. Integrating Structural Neorealism (balance of power and security dilemma) with Neoclassical Realism (domestic intervening variables), this qualitative-explanatory study relies on library research and defence policy analysis. The research reveals three principal findings: first, minilateralism constitutes a *hard external balancing* strategy by the US and its allies against Chinese assertiveness, reflecting systemic frustration with ASEAN's sluggish, consensus-based mechanisms. Second, these minilateral coalitions intensify regional security dilemmas, exacerbating internal fissures between neutrality-oriented states (Indonesia and Malaysia), frontline claimant states embracing military deterrence (the Philippines), and mainland states economically tethered to Beijing (Cambodia and Laos). Third, ASEAN centrality faces functional marginalization, relegated to consultative dialogue while actual deterrence architecture shifts to minilateral pacts. Preserving ASEAN centrality necessitates operationalizing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) supported by institutional flexibilities such as the ASEAN Minus X formula.

PENDAHULUAN

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, lanskap geopolitik kawasan Indo-Pasifik bergerak ke arah dinamika persaingan strategis yang kian meruncing. Kawasan yang membentang dari pesisir timur Afrika hingga Pasifik Barat ini bukan lagi sekadar entitas geografis, melainkan telah bertransformasi menjadi mandala utama kontestasi hegemoni global (Bisley, 2018: 312). Di tengah pusaran pergeseran tektonik tersebut, Asia Tenggara menempati posisi sentral yang sangat rentan karena diapit oleh jalur komunikasi laut (Sea Lines of Communication / SLOCs) paling vital di dunia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Laut Tiongkok Selatan, yang menopang lebih dari sepertiga lalu lintas perdagangan maritim internasional (Weatherbee, 2019: 45). Selama lebih dari lima dekade, stabilitas dan perdamaian di kawasan ini dikelola melalui kepemimpinan kelembagaan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang secara konsisten mempromosikan konsep Sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality). Melalui konsep ini, ASEAN mengukuhkan dirinya sebagai manajer primer tatanan regional yang bertugas memfasilitasi dialog, meredam friksi kekuatan besar, dan menyusun norma bersama melalui mekanisme multilateral inklusif (Acharya, 2014: 18).

Akan tetapi, fondasi arsitektur keamanan kawasan yang telah dibangun secara bertahap tersebut kini menghadapi guncangan eksistensial akibat kebangkitan kekuatan militer dan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, postur kebijakan luar negeri Beijing bergerak dari doktrin diplomasi menahan diri (*tao guang yang hui*) menuju manifestasi kebangkitan yang asertif demi merealisasikan ambisi "Peremajaan Bangsa Tionghoa" (Mearsheimer, 2019: 12). Penggelaran klaim historis Nine-Dash Line yang secara sepihak mencakup hampir 90 persen perairan Laut Tiongkok Selatan, pembangunan pangkalan militer di atas pulau-pulau karang buatan di Kepulauan Spratly dan Paracel, serta pengoperasian kapal-kapal penjaga pantai (China Coast Guard) yang agresif dinilai secara luas telah merusak kedaulatan maritim negara-negara pantai Asia Tenggara dan merongrong prinsip kebebasan bernavigasi berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS 1982 (Emmers, 2010: 88).

Ketiadaan instrumen penegakan hukum dalam mekanisme internal ASEAN menyebabkan organisasi regional ini dinilai gagal membendung laju ekspansi maritim Tiongkok. Kekecewaan mendalam terhadap lambannya diplomasi multilateral berbasis konsensus mendorong Amerika Serikat bersama sekutu-sekutu dekatnya untuk merevisi pendekatan strategis mereka di kawasan (Tow, 2019: 318). Alih-alih bertumpu pada forum multilateral yang melibatkan banyak pihak (*inclusive multilateralism*), Washington mengalihkan gravitasnya pada pembentukan format aliansi terbatas berbasis kesamaan kepentingan dan interoperabilitas militer yang dikenal luas sebagai *minilateralism* (He, 2008: 491). Tren pergeseran ini termanifestasi secara nyata melalui revitalisasi dialog keamanan empat negara Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia—pada akhir tahun 2017, serta peresmian pakta pertahanan trilateral AUKUS (Australia-United Kingdom-United States) pada tanggal 15 September 2021 (Smith, 2022: 14).

QUAD merefleksikan perpaduan kekuatan maritim utama di Indo-Pasifik yang mengintegrasikan kapabilitas intelijen, pengawasan wilayah perairan (*Maritime Domain Awareness*), dan latihan militer gabungan berskala besar seperti Exercise Malabar untuk mengimbangi manuver angkatan laut Tiongkok (Bisley, 2018: 315). Sementara itu, pembentukan AUKUS menandai lompatan dramatis menuju penguatan penangkalan keras (*hard deterrence*) melalui transfer teknologi militer strategis paling sensitif dalam sejarah modern Barat. Melalui Pilar 1 AUKUS, Australia diproyeksikan mengakuisisi sedikitnya delapan kapal selam serang bertenaga nuklir berpersenjataan konvensional (SSN-AUKUS), sementara Pilar 2 diarahkan untuk memacu kolaborasi teknologi pertahanan mutakhir mencakup kecerdasan buatan, persenjataan hipersonik, dan peperangan siber terintegrasi (Bitzinger, 2021: 2).

Meskipun para pemimpin AUKUS dan QUAD berulang kali menyatakan bahwa inisiatif mereka bertujuan mendukung arsitektur kawasan yang inklusif dan memperkuat sentralitas ASEAN, realitas politik kekuasaan menunjukkan anomali yang tajam. Keberadaan kedua pakta tersebut secara *de facto* beroperasi di luar kerangka ASEAN dan melompati mekanisme dialog yang telah ada, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS) (Tan, 2020: 3). Dalam konteks ini, timbul problematika mendasar di mana arsitektur keamanan kawasan mengalami perpecahan fungsional: urusan diplomasi normatif dibiarkan berada di tangan ASEAN, sementara keputusan mengenai

keseimbangan kekuatan militer riil diambil oleh kelompok-kelompok minilateral eksklusif (Acharya, 2017: 274).

Lebih mencemaskan lagi, pembentukan pakta-pakta pertahanan tersebut telah menyingkap dan memperparah garis retakan (*fault lines*) di dalam tubuh ASEAN sendiri. Bukannya menghasilkan respons terpadu yang solid, negara-negara anggota ASEAN terpolarisasi ke dalam pandangan yang saling bertolak belakang. Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia secara terbuka menyuarakan alarm keprihatinan atas potensi meluasnya perlombaan senjata (*arms race*) dan ancaman terhadap keselamatan navigasi di perairan selat kepulauan mereka (Sukma, 2014: 139). Sebaliknya, Filipina menyambut antusias kehadiran AUKUS dan perluasan pangkalan militer Amerika Serikat sebagai perisai penyeimbang atas pelanggaran teritorial Beijing di zona ekonomi eksklusifnya (Smith, 2022: 17). Di sisi lain, Kamboja dan Laos, yang terikat erat oleh ketergantungan utang dan investasi infrastruktur Tiongkok, memilih bersikap pasif atau menyelaraskan narasinya dengan kepentingan Beijing (Kuik, 2008: 162). Polarisasi internal ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana otonomi strategis dan sentralitas ASEAN mampu bertahan di tengah badai kompetisi kekuasaan hegemoni.

Berdasarkan latar belakang problematika tersebut, artikel ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan penelitian utama: pertama, bagaimana pembentukan pakta minilateral AUKUS dan QUAD merekonfigurasi arsitektur pertahanan di Indo-Pasifik serta memicu marginalisasi fungsional terhadap Sentralitas ASEAN? Kedua, mengapa negara-negara anggota ASEAN menunjukkan pola respons kebijakan luar negeri yang terpolarisasi, dan bagaimana fenomena ini dapat dijelaskan melalui integrasi teoretis Neorealisme struktural dan Realisme Neoklasik? Untuk membedah problematika ini secara analitis, penelitian ini mengoperasionalkan sintesis antara Neorealisme Struktural dan Realisme Neoklasik. Neorealisme struktural, yang dikemukakan secara klasik oleh Kenneth Waltz (1979: 88-102) dalam *Theory of International Politics* dan dielaborasi oleh John Mearsheimer (2001: 29-45) dalam karyanya *The Tragedy of Great Power Politics*, memberikan pijakan dasar bahwa anarki internasional memaksa negara untuk mengejar keamanan melalui perimbangan kekuatan (*balance of power*). Dalam pandangan realisme ofensif Mearsheimer (2001: 33), negara-negara besar selalu mencari peluang untuk mendominasi sistem guna mencegah negara lain mencapai status hegemoni regional. Dari kacamata ini, kemunculan AUKUS dan QUAD dipahami sebagai langkah penyeimbangan eksternal (*external balancing*) rasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya demi membangun penangkalan kredibel terhadap hegemoni maritim Tiongkok, di mana institusi internasional multilateral dianggap tidak memiliki kapabilitas materiil untuk memaksakan perdamaian (Waltz, 1979: 115).

Selain itu, konsep *Security Dilemma* yang dirumuskan oleh Robert Jervis (1978: 167-175) dan diperluas oleh Glenn Snyder (1984: 462) menjelaskan bagaimana manuver pengadaan alutsista strategis yang dimaksudkan sebagai tindakan defensif oleh satu pihak, kerap ditafsirkan sebagai ancaman ofensif eksistensial oleh pihak lain. Akuisisi kapal selam nuklir Australia di bawah AUKUS dan patroli maritim gabungan QUAD memicu aksi tandingan (*counter-action*) dari Beijing, sehingga melahirkan spiral ketegangan militer yang menjebak negara-negara Asia Tenggara di tengah kontestasi senjata modern (Jervis, 1978: 174).

Akan tetapi, kelemahan mendasar Neorealisme struktural terletak pada kecenderungannya memperlakukan negara sebagai aktor yang seragam (*black box*), sehingga teori ini gagap menjelaskan mengapa negara-negara di kawasan yang sama, seperti Indonesia, Filipina, dan Kamboja, merespons stimulus sistemik yang sama dengan tindakan kebijakan luar negeri yang sangat berbeda. Guna mengatasi keterbatasan ini, penelitian ini mengintegrasikan kerangka Realisme Neoklasik yang digagas oleh Gideon Rose (1998: 144-152) dan Randall Schweller (2006: 18-35). Realisme Neoklasik berargumen bahwa pengaruh distribusi kekuatan anarki internasional (*variabel independen*) tidak langsung menentukan perilaku kebijakan luar negeri suatu negara (*variabel dependen*), melainkan harus melalui proses penyaringan oleh variabel-variabel perantara di tingkat domestik (*domestic intervening variables*). Variabel perantara tersebut mencakup persepsi dan kalkulasi ancaman para elit pembuat kebijakan (*leader threat perceptions*), doktrin strategis identitas bangsa, tingkat ketergantungan ekonomi bilateral terhadap kekuatan luar, serta kohesi atau fragmentasi rezim domestik (Schweller, 2006: 22; Rose, 1998: 147). Melalui sintesis ini, dinamika struktural minilateralisme dan disparitas pilihan strategis di Asia Tenggara dapat dianalisis secara komprehensif, logis, dan mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksplanatori untuk mengurai fenomena hubungan internasional yang kompleks dan multidimensional (Creswell, 2016: 42). Pendekatan kualitatif dipandang paling relevan karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis interpretasi strategis, kalkulasi kekuasaan, kalkulasi kepentingan nasional, dan dinamika interaksi antar-negara yang tidak dapat dikuantifikasi melalui parameter statistik sederhana (George & Bennett, 2005: 19). Melalui desain eksplanatori, peneliti berupaya membongkar hubungan sebab-akibat struktural antara kebangkitan pakta keamanan minilateral sebagai variabel independen dan pergeseran arsitektur keamanan kawasan serta polarisasi ASEAN sebagai variabel dependen, dengan memperhatikan variabel intervening di tingkat domestik masing-masing negara anggota (Rose, 1998: 150). Korpus data yang dioperasionalkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui metode penelusuran kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan mendalam (Jackson & Sorensen, 2013: 88). Sumber data diklasifikasikan ke dalam tiga pilar utama. Pilar pertama adalah dokumen resmi kenegaraan dan arsip diplomasi, yang mencakup teks Piagam ASEAN (ASEAN Charter), dokumen Treaty of Amity and Cooperation (TAC), Deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), naskah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), komunike bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting / AMM), serta buku putih pertahanan dan dokumen strategi keamanan nasional negara-negara terkait, seperti US National Defense Strategy, Australian Defence Strategic Review 2023, serta pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Malaysia.

Pilar kedua adalah literatur akademik terindeks bereputasi tinggi yang memuat diskursus teoritis dan empiris mengenai geopolitik Asia Tenggara, neorealisme, dan perimbangan kekuatan Indo-Pasifik, yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional seperti *International Security*, *Foreign Affairs*, *The Pacific Review*, *Contemporary Southeast Asia*, dan *Australian Journal of International Affairs*. Pilar ketiga mencakup laporan analisis kebijakan dari lembaga kajian strategis terkemuka dunia, seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Institute for Strategic Studies (IISS), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dan Lowy Institute, serta laporan jurnalistik investigatif dari media internasional terverifikasi seperti Reuters, Nikkei Asia, dan The Diplomat.

Teknik analisis data mengadaptasi kerangka interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014: 12-14), yang dijalankan melalui empat tahapan yang saling berhubungan: Kondensasi Data (*Data Condensation*): Peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, simplifikasi, dan transformasi data mentah dari dokumen-dokumen kebijakan, pernyataan resmi para pejabat tinggi, dan literatur akademik, guna memisahkan retorika normatif publik dari substansi manuver kapabilitas pertahanan riil. Kategorisasi Teoretis (*Theoretical Coding*): Data yang telah dikondensasi kemudian dipilah ke dalam dimensi analitis yang diturunkan dari kerangka Neorealisme dan Realisme Neoklasik, mencakup klaster perimbangan kekuatan hegemoni, dinamika dilema keamanan maritim, mekanisme institusional sentralitas ASEAN, serta variabel domestik persepsi elit dan ketergantungan ekonomi bilateral (Schweller, 2006: 25).

Penyajian Data secara Naratif (*Data Display*): Seluruh fakta empiris dan relasi konseptual disusun ke dalam bentuk narasi analitis diskursif yang runtut, saling bertaut antar-paragraf, dan membandingkan secara komparatif kalkulasi strategis masing-masing aktor negara di kawasan Asia Tenggara. Penarikan Kesimpulan dan Triangulasi (*Conclusion Drawing and Verification*): Peneliti merumuskan proposisi eksplanatori dan melakukan verifikasi validitas temuan melalui teknik triangulasi sumber (Miles et al., 2014: 14). Peneliti menguji konsistensi data dengan menyandingkan perspektif aliansi Barat (AS dan Australia), perspektif penyeimbang Tiongkok, serta perspektif internal negara-negara anggota ASEAN guna meminimalisasi bias interpretasi dan memastikan objektivitas analisis ilmiah.

PEMBAHASAN

Untuk membedah ancaman struktural terhadap Sentralitas ASEAN, perlu dipahami terlebih dahulu genealogi dan karakter dasar dari kebangkitan minilateralisme di Indo-Pasifik. Minilateralisme bukanlah fenomena yang muncul secara kebetulan di ruang hampa, melainkan merupakan tanggapan korektif terhadap ketidakmampuan mekanisme multilateral regional dalam mengelola friksi kekuatan besar (Tow, 2019: 319). Pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an, tatanan keamanan kawasan diwarnai oleh optimisme institusionalisme liberal yang mempercayai bahwa integrasi ekonomi dan

dialog multilateral yang inklusif dapat mensosialisasikan kekuatan baru seperti Tiongkok ke dalam norma-norma internasional yang damai (Acharya, 2014: 112). Namun, realitas geopolitik dekade terakhir membuktikan bahwa sosialisasi normatif tersebut gagal mencegah Tiongkok memanfaatkan kekayaan ekonominya untuk membangun kekuatan militer ekspansif yang mengubah status quo teritorial di kawasan (Mearsheimer, 2019: 23).

Kebangkitan kembali QUAD pada akhir tahun 2017 menjadi titik tolak perubahan struktural tersebut. Pada mulanya, QUAD digagas oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2007 sebagai konsensus nilai antara empat negara demokrasi maritim (Bisley, 2018: 314). Namun, inisiatif ini sempat terbengkalai selama satu dekade karena kekhawatiran Australia di bawah kepemimpinan Kevin Rudd yang tidak ingin merusak hubungan perdagangan bilateral dengan Beijing (Kuik, 2008: 165). Pembentukan ulang QUAD pada tahun 2017 didorong oleh kesadaran bersama di Washington, Tokyo, New Delhi, dan Canberra bahwa asertivitas maritim Tiongkok telah melampaui batas toleransi strategis mereka. Insiden perbatasan di Doklam dan Lembah Galwan antara Tiongkok dan India, tekanan ekonomi Tiongkok terhadap Australia, serta meningkatnya frekuensi penerobosan wilayah udara Taiwan dan perairan Kepulauan Senkaku oleh militer Tiongkok telah menyatukan kepentingan strategis keempat negara tersebut (Smith, 2022: 15).

Dalam kacamata Neorealisme Kenneth Waltz (1979: 118), sistem internasional yang anarkis secara otomatis mendorong negara-negara yang merasa terancam untuk melakukan tindakan perimbangan (*balancing*). QUAD menjalankan fungsi penyeimbangan gabungan yang meliputi diplomasi penangkalan lunak (*soft balancing*) melalui penguatan kerja sama infrastruktur tandingan bagi Belt and Road Initiative (BRI), keamanan siber, dan pasokan rantai nilai semikonduktor—sekaligus penyeimbangan keras (*hard balancing*) melalui koordinasi operasional angkatan laut dan pertukaran data intelijen maritim secara real-time (He, 2008: 494).

Langkah penyeimbangan tersebut mencapai puncaknya dengan diumumkannya pembentukan aliansi trilateral AUKUS pada bulan September 2021. Berbeda dengan QUAD yang masih mempertahankan kemasam diplomatik penyediaan barang publik (*public goods*), AUKUS merupakan aliansi pertahanan militer murni (*hard military alliance*) (Bitzinger, 2021: 3). Keputusan strategis Australia untuk membatalkan kesepakatan pengadaan kapal selam konvensional kelas Attack senilai 90 miliar dolar Australia dengan Naval Group Prancis demi mengakuisisi kapal selam serang bertenaga nuklir (SSN) rancangan gabungan AS dan Inggris merefleksikan perubahan mendasar dalam doktrin pertahanan Canberra. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan Defence Strategic Review 2023, Australia tidak lagi memandang jarak geografisnya sebagai benteng pertahanan alami, melainkan menyadari perlunya kemampuan proyeksi kekuatan serangan jarak jauh (*long-range strike capabilities*) untuk menangkal musuh potensial jauh sebelum mereka mencapai perairan Australia (Bitzinger, 2021: 4).

Dari perspektif realisme ofensif John Mearsheimer (2001: 35), AUKUS adalah manifestasi klasik dari instrumen penangkalan (*deterrence*) yang dirancang untuk membendung upaya hegemoni Tiongkok. Bagi Amerika Serikat, penyebaran kekuatan kapal selam bertenaga nuklir Australia di belahan selatan Indo-Pasifik memecahkan tantangan disparitas jarak tempuh geografis (*tyranny of distance*). Kapal selam bertenaga nuklir memiliki keunggulan kecepatan, ketahanan berada di bawah laut selama berbulan-bulan tanpa perlu muncul ke permukaan, serta daya jangkauan jelajah yang hampir tak terbatas dibandingkan kapal selam diesel-elektrik konvensional (Bitzinger, 2021: 5). Hal ini memungkinkan armada Australia untuk beroperasi secara intensif di titik-titik sempit kawasan Asia Tenggara dan Laut Tiongkok Selatan, memberikan kontribusi materiil langsung terhadap strategi penahanan laut (*sea denial*) pimpinan Amerika Serikat.

Implikasi struktural dari fenomena ini adalah terjadinya pergeseran tatanan keamanan regional dari arsitektur "multilateralisme yang digerakkan oleh proses" (*process-driven multilateralism*) menjadi "minilateralisme yang digerakkan oleh kapabilitas" (*capability-driven minilateralism*) (Tow, 2019: 320). Dalam arsitektur minilateral, efisiensi operasional dan kapabilitas tempur riil diutamakan di atas konsensus diplomatik yang lamban. Kekuatan-kekuatan besar memandang bahwa forum-forum yang dipimpin ASEAN tidak dirancang untuk mengambil keputusan kilat saat krisis keamanan meletus. Dengan demikian, kehadiran AUKUS dan QUAD mencerminkan pengabaian *de facto* terhadap sentralitas institusi ASEAN dalam kalkulasi pertahanan strategis kekuatan-kekuatan besar (Acharya, 2017: 275).

Dampak paling mengkhawatirkan dari kebangkitan pakta keamanan minilateral ini adalah akselerasi spiral dilema keamanan (*security dilemma*) di kawasan Asia Tenggara. Teori dilema keamanan Robert Jervis (1978: 169) menegaskan bahwa anarki internasional menciptakan ketidakpastian mendalam atas intensi strategis negara lain. Ketika suatu negara mengambil langkah-langkah militer untuk mengamankan dirinya, langkah tersebut secara hampir pasti dipersepsikan oleh negara lawan sebagai ancaman ofensif yang berbahaya, yang memicu tindakan balasan yang setara atau bahkan lebih destruktif, sehingga menciptakan lingkaran setan peningkatan persenjataan yang mereduksi tingkat keamanan semua pihak (Jervis, 1978: 172). AUKUS secara langsung mengkatalisasi spiral dilema keamanan ini di halaman depan ASEAN. Dari sudut pandang Canberra dan Washington, akuisisi kapal selam bertenaga nuklir merupakan respons defensif proporsional terhadap modernisasi angkatan laut Tiongkok yang merupakan ekspansi kekuatan maritim tercepat sejak Perang Dunia II (Bitzinger, 2021: 4). Namun, dari perspektif kepemimpinan militer di Beijing, proyek AUKUS ditafsirkan sebagai bentuk pengepungan strategis (*strategic encirclement*) yang dipimpin kekuatan Barat untuk membatasi kebebasan manuver Tiongkok di dalam First Island Chain dan Selat Malaka (Smith, 2022: 18). Sebagai respons balasan (*counter-balancing*), Tiongkok mempercepat produksi kapal selam serang nuklir generasi Type 095 dan kapal selam rudal balistik Type 096, memperluas pangkalan armada kapal selam di Yulin (Pulau Hainan), serta menyebarkan jaringan sensor akustik bawah air berskala besar yang dikenal sebagai Underwater Great Wall di sepanjang Laut Tiongkok Selatan (Emmers, 2010: 95).

Bagi negara-negara di Asia Tenggara, eskalasi dilema keamanan ini mendatangkan bahaya multidimensi yang sangat nyata: Pertama, terjadinya kerentanan serius terhadap rezim non-proliferasi senjata nuklir internasional. Meskipun para perancang AUKUS berulang kali menegaskan bahwa kapal selam Australia hanya bertenaga nuklir (*nuclear-powered*) dan bukan bersenjata nuklir (*nuclear-armed*), pakta pertahanan ini memanfaatkan ambiguitas regulasi dalam Pasal 14 Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) (Bitzinger, 2021: 5). Klausul tersebut memperbolehkan pengalihan bahan fisi nuklir berdensitas tinggi (*Highly Enriched Uranium / HEU* yang berkadar senjata) untuk keperluan propulsi kapal perang tanpa harus tunduk pada mekanisme inspeksi berkala komprehensif dari Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency / IAEA*). Sebagaimana dicatat oleh diplomat senior Indonesia, celah ini menciptakan preseden hukum yang sangat berisiko bagi stabilitas kawasan karena membuka peluang bagi negara-negara lain untuk mengembangkan program kapal selam nuklir serupa tanpa pengawasan ketat, yang pada gilirannya berpotensi menggerogoti efektivitas Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone / SEANWFZ* atau Perjanjian Bangkok 1995) (Sukma, 2014: 141).

Kedua, pengintensifan ancaman militerisasi di jalur perairan selat strategis kepulauan Indonesia. Wilayah maritim Asia Tenggara merupakan *choke points* vital yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Peningkatan aktivitas operasi kapal selam bertenaga nuklir dari negara-negara anggota AUKUS maupun kapal selam pelacak milik Tiongkok di dalam koridor Jalur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) khususnya Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Ombai-Wetar yang memiliki kedalaman laut ideal bagi infiltrasi bawah air meningkatkan probabilitas insiden maritim yang fatal (Weatherbee, 2019: 112). Ketiadaan transparansi lalu lintas militer bawah permukaan serta keterbatasan teknologi peperangan antikapal selam (*anti-submarine warfare*) yang dimiliki oleh negara-negara pantai di Asia Tenggara menempatkan kedaulatan teritorial mereka pada posisi rentan tanpa perlindungan yang memadai (Emmers, 2010: 101).

Ketiga, pemicuan dinamika perlombaan senjata regional (*regional arms dynamics*). Terperangkap di tengah eskalasi kekuatan militer besar, negara-negara anggota ASEAN terdorong untuk menempuh tindakan penyeimbangan internal (*internal balancing*) dengan cara melipatgandakan anggaran belanja alutsista mereka (Schweller, 2006: 28). Singapura secara konsisten memodernisasi armadanya melalui pembelian jet tempur siluman F-35B dan kapal selam kelas *Invincible*; Indonesia merealisasikan pengadaan puluhan pesawat tempur canggih Dassault Rafale serta kapal fregat berbobot besar; sementara Vietnam dan Malaysia memperkuat sistem pertahanan rudal pantai serta baterai artileri maritim mereka (Weatherbee, 2019: 120). Terjadinya akumulasi perangkat militer modern di kawasan Asia Tenggara di tengah absennya kerangka arsitektur kontrol senjata (*arms control regime*) yang mengikat semakin memperparah atmosfer ketidakpercayaan timbal balik, mengikis rasa saling percaya antar-tetangga (*confidence-building measures*) yang telah dipupuk sejak Deklarasi Bali Concord 1976 (Acharya, 2014: 125).

Konsep Sentralitas ASEAN merupakan pilar normatif yang mendasari klaim bahwa ASEAN adalah institusi penggerak utama (driver) dalam mengelola tatanan stabilitas regional di kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik (Acharya, 2017: 273). Sentralitas ini memiliki dua dimensi yang saling menopang, yaitu sentralitas internal (solidaritas, kekompakan posisi diplomatik, dan kohesi antar-anggota) serta sentralitas eksternal (pengakuan dan legitimasi dari kekuatan-kekuatan besar dunia bahwa mekanisme pimpinan ASEAN adalah arena primer untuk menyelesaikan perselisihan kawasan) (Tan, 2020: 4). Kebangkitan AUKUS dan QUAD telah mendevaluasi kedua dimensi sentralitas tersebut, mendorong terjadinya fenomena yang diidentifikasi oleh para sarjana studi hubungan internasional sebagai marginalisasi fungsional (functional marginalization) (Smith, 2022: 19; Acharya, 2017: 275). Marginalisasi fungsional mengindikasikan bahwa meskipun ASEAN secara nominal tetap menyelenggarakan pertemuan diplomatik tahunan yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, bobot substansi pengambilan keputusan strategis terkait perang, perdamaian, dan perimbangan militer telah bermigrasi ke luar forum ASEAN, menuju aliansi-aliansi minilateral yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil nyata.

Akar dari marginalisasi ini bermuara pada batasan inheren dari norma ASEAN Way ketika berhadapan dengan realitas politik kekuasaan (power politics). Norma ASEAN Way mengedepankan prinsip konsultasi (musyawarah), penegakan konsensus mutlak dalam pengambilan keputusan, non-intervensi dalam urusan internal negara anggota, serta adopsi kesepakatan yang bersifat tidak mengikat secara hukum (non-binding agreements) (Haacke, 2003: 42). Pada masa damai dan integrasi ekonomi, norma ini terbukti berhasil meredakan konflik intra-kawasan dan membangun jembatan dialog inklusif. Namun, ketika tatanan kawasan dihadapkan pada ancaman hegemoni revisionis yang mengabaikan hukum internasional, mekanisme konsensus terbukti melahirkan kelumpuhan kelembagaan (institutional paralysis) (Acharya, 2014: 215).

Sebagai ilustrasi empiris yang paling mencolok, proses perundingan Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan (Code of Conduct / CoC) antara ASEAN dan Tiongkok telah berlangsung selama lebih dari dua dekade sejak penandatanganan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) pada tahun 2002 di Phnom Penh, tanpa pernah menghasilkan draf akhir yang mengikat secara operasional (Weatherbee, 2019: 135). Di bawah payung negosiasi yang terus diulur tersebut, Beijing secara konsisten menyelesaikan pembangunan fasilitas pangkalan militer, landasan pacu jet tempur, dan penempatan sistem radar pelacak di terumbu karang Mischief, Subi, dan Fiery Cross (Emmers, 2010: 104). Fakta ini meyakinkan para pembuat kebijakan pertahanan di Washington, Tokyo, dan Canberra bahwa kerangka kerja sama ASEAN telah berubah menjadi tameng diplomasi bagi Tiongkok untuk mengulur waktu dan meredam protes internasional.

Dalam pandangan Neorealisme Kenneth Waltz (1979: 115), institusi internasional pada dasarnya tidak memiliki otoritas independen di luar kehendak kekuatan-kekuatan yang menyusunnya. Ketika institusi tersebut tidak lagi mampu memberikan jaminan keamanan materiil bagi anggotanya, para aktor strategis akan kembali pada mekanisme swa-bantu (self-help system) melalui pembentukan aliansi-aliansi militer tertutup (Mearsheimer, 2001: 42). AUKUS dan QUAD mencerminkan realisasi dari postulat tersebut. Kedua pakta ini tidak berupaya menggantikan ASEAN secara formal, melainkan meminggirkan relevansi fungsinya dalam ranah keamanan keras (hard security). ASEAN dibiarkan berfungsi sebagai panggung retorika persahabatan dan diplomasi ekonomi lunak, sementara arsitektur penangkalan kekuatan yang sesungguhnya dirancang dan dioperasikan oleh aliansi minilateral (Tan, 2020: 6).

Mengapa negara-negara Asia Tenggara tidak mampu merumuskan respons kebijakan luar negeri yang seragam dalam menghadapi penetrasi AUKUS dan QUAD? Mengapa respons mereka terbelah secara tajam dari penolakan keras hingga dukungan terbuka? Untuk membongkar anomali ini, analisis Neorealisme struktural harus disempurnakan dengan kerangka kerja Realisme Neoklasik. Sebagaimana ditegaskan oleh Randall Schweller (2006: 22) dan Gideon Rose (1998: 147), distribusi kekuatan dalam sistem anarki internasional hanya menyediakan insentif dan batasan makro bagi perilaku negara. Bagaimana tekanan sistemik tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan diplomatik riil sangat bergantung pada transmisi variabel perantara di tingkat domestik (domestic intervening variables). Variabel-variabel domestik tersebut mencakup persepsi elit terhadap ancaman (elite threat perception), doktrin identitas kebijakan luar negeri historis, derajat keterikatan ekonomi bilateral terhadap kekuatan besar, serta kohesi politik internal (Schweller, 2006: 34).

Dalam kasus respons terhadap AUKUS dan QUAD, negara-negara anggota ASEAN terfragmentasi ke dalam empat klaster orientasi strategis yang berbeda: Indonesia dan Malaysia mewakili sikap skeptisisme kritis (*cautious to open skepticism*) terhadap kehadiran AUKUS dan QUAD. Variabel intervensi domestik utama di Indonesia adalah doktrin kebijakan luar negeri "Bebas Aktif" yang diwariskan sejak awal kemerdekaan oleh Mohammad Hatta, yang menolak persekutuan militer dengan blok mana pun demi mempertahankan kedaulatan bangsa (Sukma, 2014: 138). Elit diplomatik Indonesia memandang AUKUS sebagai ancaman langsung terhadap prinsip otonomi strategis regional. Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia segera setelah pembentukan AUKUS secara tegas menekankan kekhawatiran atas berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan, serta mendesak Australia untuk mematuhi kewajiban non-proliferasi di bawah NPT dan Perjanjian SEANWFZ (Smith, 2022: 16).

Secara domestik, meskipun perairan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna Utara kerap diterobos oleh kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok, elit pengambil kebijakan di Jakarta mengimbangi persepsi ancaman keamanan tersebut dengan ketergantungan ekonomi yang mendalam terhadap Beijing. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan investor utama dalam proyek infrastruktur strategis nasional, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan hilirisasi pertambangan nikel domestik (Kuik, 2008: 168). Oleh karena itu, respon Indonesia tidak diwujudkan melalui persekutuan militer, melainkan melalui kepemimpinan normatif di tingkat multilateral, seperti memelopori adopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan mengajukan dokumen teknis pengawasan pengalihan bahan bakar nuklir kapal selam pada forum peninjauan NPT di markas PBB (Sukma, 2014: 144).

Di Malaysia, variabel intervensi domestik diperkuat oleh komitmen historis mendalam terhadap Deklarasi ZOPFAN 1971 dan sensitivitas politik domestik terhadap hegemoni kekuatan Barat. Perdana Menteri Malaysia saat itu, Ismail Sabri Yaakob, menyampaikan penolakan terbuka dengan memperingatkan bahwa pakta AUKUS berisiko memicu perang nuklir di kawasan dan mempercepat eskalasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (Bitzinger, 2021: 5). Ketergantungan ekonomi Malaysia yang sangat besar pada ekspor komoditas ke pasar Tiongkok, dipadukan dengan demografi domestik multietnis dan penolakan publik terhadap pangkalan militer asing, mendorong Kuala Lumpur memilih sikap yang tegas menentang aliansi penangkalan Barat, meskipun Malaysia tetap memelihara kerja sama pertahanan terbatas di bawah payung Five Power Defence Arrangements (FPDA) bersama Inggris dan Australia (Kuik, 2008: 172).

Berbeda secara diametral dengan Jakarta dan Kuala Lumpur, Filipina menampilkan respons penerimaan yang sangat antusias (*explicit embracement*) terhadap kehadiran AUKUS dan QUAD. Berdasarkan kacamata Realisme Neoklasik, variabel intervensi penentu di Manila adalah persepsi ancaman eksistensial yang dirasakan langsung oleh elit dan masyarakat Filipina akibat tindakan koersif Tiongkok di Laut Filipina Barat (Smith, 2022: 17). Rentetan insiden kekerasan di Beting Thomas Kedua (Second Thomas Shoal) dan Scarborough Shoal di mana kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air bertekanan tinggi, menabrak kapal logistik angkatan laut Filipina, dan mencederai pelaut lokal telah menghancurkan kepercayaan domestik terhadap diplomasi damai ASEAN (Weatherbee, 2019: 142).

Pergantian tampuk kepemimpinan dari Presiden Rodrigo Duterte ke Ferdinand Marcos Jr. pada tahun 2022 menjadi katalisator domestik yang merevitalisasi haluan strategis Manila. Berbeda dari Duterte yang berupaya merangkul Beijing demi janji investasi infrastruktur yang sebagian besar tidak terealisasi, Marcos Jr. kembali menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan sekutu pertahanan historisnya di bawah Mutual Defense Treaty (MDT) 1951 (Smith, 2022: 18). Manila secara proaktif memperluas perjanjian kerja sama pertahanan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) dengan memberikan akses kepada militer Amerika Serikat ke empat pangkalan baru di Luzon utara yang berhadapan langsung dengan Taiwan. Bagi elit strategis di Manila, janji normatif sentralitas ASEAN terbukti impoten melindungi integritas wilayah teritorial nasionalnya, sehingga mengikat diri ke dalam arsitektur penangkalan keras Amerika Serikat dan menyambut inisiatif minilateral AUKUS dan QUAD dinilai sebagai satu-satunya kalkulasi rasional untuk bertahan hidup (Rose, 1998: 154).

Singapura dan Vietnam mewakili pendekatan realisme pragmatis yang sangat terukur dalam merespons tekanan sistemik. Bagi Singapura, doktrin keamanan nasionalnya dibangun di atas kesadaran inheren sebagai negara-kota pulau kecil yang rentan (*vulnerable small island state*) yang dikelilingi oleh tetangga-tetangga maritim besar (Kuik, 2008: 175). Elit pertahanan Singapura meyakini doktrin bahwa

kelangsungan hidup negara hanya dapat terjamin apabila terdapat perimbangan kekuatan yang stabil di kawasan melalui kehadiran militer Amerika Serikat (*external counterweight*). Oleh sebab itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyambut baik kehadiran AUKUS dan QUAD dengan catatan bahwa kedua mekanisme tersebut harus bekerja untuk memelihara stabilitas tatanan internasional dan melengkapi arsitektur kawasan yang telah dipimpin ASEAN (Smith, 2022: 17). Singapura membuktikan komitmen pragmatis ini dengan terus menyediakan fasilitas logistik dan operasional bagi kapal perang dan jet tempur AS di Pangkalan Angkatan Laut Changi (Weatherbee, 2019: 148).

Sementara itu, Vietnam memperlihatkan strategi manuver yang sangat berhati-hati (*nuanced hedging*). Memori historis perang perbatasan dengan Tiongkok pada tahun 1979 serta sengketa kedaulatan yang berkepanjangan atas Kepulauan Paracel dan Spratly menjadikan Hanoi sangat waspada terhadap ekspansionisme militer Tiongkok (Emmers, 2010: 112). Secara terselubung, elit militer Vietnam menyambut baik penangkalan yang dihadirkan oleh AUKUS dan QUAD untuk menahan dominasi PLAN di Laut Tiongkok Selatan. Namun, variabel doktrin pertahanan domestik "Empat Tidak" (*Four No's*) tidak bersekutu secara militer, tidak memfasilitasi pangkalan militer asing di wilayahnya, tidak berpihak pada satu negara untuk melawan negara lain, serta tidak menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional—mencegah Vietnam untuk menyatakan dukungan resmi secara terbuka demi menghindari konfrontasi langsung dengan Beijing yang dapat memicu destabilisasi rezim komunis domestiknya (Kuik, 2008: 178).

Di kutub paling berlawanan, Kamboja dan Laos menampilkan perilaku luar negeri yang dalam terminologi realisme didefinisikan sebagai *bandwagoning* (penyelarasan kepentingan) dengan pihak yang dipersepsikan sebagai patron hegemoni terkuat (Schweller, 2006: 29). Kedua negara daratan ini tidak memiliki klaim maritim di Laut Tiongkok Selatan dan tidak berhadapan langsung dengan bahaya intrusi maritim Tiongkok. Variabel intervensi domestik yang paling dominan di Phnom Penh dan Vientiane adalah ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada arus bantuan keuangan luar negeri, pinjaman lunak, dan investasi infrastruktur raksasa Tiongkok di bawah skema Belt and Road Initiative (BRI) (Kuik, 2008: 180). Bagi rezim politik Kamboja di bawah kepemimpinan Hun Sen dan putranya Hun Manet, kelangsungan hidup rezim domestik dan stabilitas ekonomi nasional bertumpu sepenuhnya pada sokongan modal dari Beijing. Dampak dari keterikatan struktural ini termanifestasi secara berulang dalam diplomasi regional: Kamboja bertindak sebagai proksi yang memveto setiap upaya konsensus ASEAN yang bermaksud melontarkan kritik eksplisit terhadap ekspansi militer Tiongkok, sebagaimana terjadi pada kegagalan bersejarah penerbitan komunike bersama menteri luar negeri AMM di Phnom Penh tahun 2012 (Weatherbee, 2019: 155). Dalam menyikapi kemunculan AUKUS dan QUAD, Kamboja dan Laos secara konsisten mengadopsi narasi Beijing dengan menyebut aliansi minilateral tersebut sebagai bentuk upaya destruktif Barat untuk mengobarkan kembali polarisasi mentalitas Perang Dingin di Asia.

Fragmentasi respons domestik yang sangat tajam inilah yang membuktikan validitas postulat Realisme Neoklasik. Ketika tekanan sistemik struktural disaring oleh persepsi ancaman para elit, kepentingan kelangsungan rezim politik lokal, dan ketergantungan ekonomi bilateral yang saling bertolak belakang, institusi ASEAN kehilangan kohesi internalnya (*internal cohesion*). Ketidakmampuan merumuskan posisi tawar bersama yang solid ini pada akhirnya membuka pintu selebar-lebarnya bagi AUKUS dan QUAD untuk mengambil alih komando pengelolaan stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Menyadari ancaman nyata dari pergeseran arsitektur keamanan kawasan ke arah polarisasi minilateral, ASEAN berusaha meluncurkan inisiatif pemulihan wibawa melalui penerbitan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok pada bulan Juni 2019 (ASEAN Secretariat, 2019: 1). Diarsiteki oleh diplomasi intensif pemerintah Indonesia, AOIP dirancang sebagai instrumen normatif tandingan (*normative counter-strategy*) untuk menegaskan kembali bahwa sentralitas ASEAN tidak boleh dikesampingkan dalam pembacaan tata kelola geopolitik kawasan (Tan, 2020: 5).

Secara filosofis, AOIP berusaha membendung logika pembendungan eksklusif yang diusung oleh konsep *Free and Open Indo-Pacific* versi Amerika Serikat dan QUAD. Sebagaimana termaktub dalam naskah resminya, AOIP mempromosikan pendekatan kawasan yang berlandaskan pada tiga prinsip utama (ASEAN Secretariat, 2019: 2-4): Inklusivitas Terbuka (*Inclusive Engagement*): Menolak secara eksplisit mentalitas permainan menang-kalah (*zero-sum game*) dan pembentukan blok-blok militer yang saling bermusuhan, dengan memposisikan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia sebagai satu kesatuan mandala kerja sama terpadu yang merangkul seluruh kekuatan besar tanpa pengecualian.

Prioritas Kerja Sama Fungsional Non-Militer: Mengalihkan fokus wacana strategis dari isu-isu sekuritisasi dan penangkalan pertahanan yang memecah belah menuju empat pilar kerja sama praktis: konektivitas kawasan, kerja sama maritim berkelanjutan, integrasi ekonomi, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs 2030).

Pemberdayaan Forum Multilateral yang Telah Ada: Memperkuat legitimasi forum-forum yang dipimpin oleh ASEAN, khususnya East Asia Summit (EAS), sebagai arena sentral bagi para pemimpin negara adidaya untuk melakukan dialog strategis transparan (ASEAN Secretariat, 2019: 3). Meskipun AOIP dipuji secara luas sebagai keberhasilan diplomatik yang menunjukkan kelihaian retorika Indonesia, analisis kritis Neorealisme membongkar keterbatasan struktural mendasar yang melingkupi dokumen tersebut: Pertama, ketiadaan mekanisme keamanan keras (lack of hard security teeth). Di tengah era politik kekuasaan (power politics) yang digerakkan oleh penumpukan alutsista mutakhir dan ancaman penggunaan kekuatan koersif, AOIP hanya menyajikan prinsip-prinsip normatif tanpa menyediakan instrumen penegakan operasional (Tan, 2020: 7). Dokumen ini tidak memuat protokol intervensi krisis militer, tidak merumuskan aturan keterlibatan (rules of engagement) bagi kapal-kapal militer yang berpatroli di perairan sengketa, serta tidak mampu mencegah pembangunan instalasi rudal ofensif di laut lepas (Mearsheimer, 2019: 32).

Kedua, fenomena komitmen retorika tanpa implementasi materiil (rhetorical entrapping). Baik Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, Jepang, maupun India secara formal menyampaikan dukungan diplomatik terhadap AOIP dalam komunikasi resmi mereka bersama ASEAN. Namun, dari sudut pandang Neorealisme, dukungan verbal ini hanyalah bentuk basa-basi diplomatik (diplomatic pleasantries) yang berbiaya murah (Waltz, 1979: 116). Di tataran praktis, kekuatan-kekuatan besar tersebut tetap melanjutkan manuver geopolitik riil mereka: Amerika Serikat terus menggelontorkan dana teknologi pertahanan mutakhir ke dalam aliansi AUKUS dan memperdalam interoperabilitas tempur di bawah QUAD, sementara Tiongkok terus memperkuat kendali de facto atas wilayah perairan sengketa melalui milisi maritim dan pembangunan infrastruktur geostrategis (Smith, 2022: 20).

Ketiga, ketiadaan pendanaan operasional independen (budgetary constraints). Sebagian besar inisiatif kerja sama yang dipayungi di bawah bendera AOIP pada kenyataannya hanyalah pelabelan ulang (rebranding) dari proyek-proyek konektivitas bilateral yang telah didanai oleh kekuatan eksternal, seperti Jepang melalui JICA atau Tiongkok melalui BRI (Tan, 2020: 8). Ketidadaan sumber daya finansial dan kapabilitas pertahanan mandiri menyebabkan AOIP tetap terperangkap sebagai dokumen filosofis yang indah di atas kertas, tetapi kehilangan daya tekan operasional untuk meredam ambisi penyeimbangan kekuatan militer AUKUS dan QUAD di kawasan Indo-Pasifik.

PENUTUP

Kajian ini telah membedah secara naratif, komprehensif, dan terperinci mengenai dampak kebangkitan pakta keamanan minilateral AUKUS dan QUAD terhadap Sentralitas ASEAN dalam lanskap strategis kawasan Indo-Pasifik. Melalui integrasi kerangka eksplanatori Neorealisme Struktural dan Realisme Neoklasik, penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan analitis utama: Pertama, kemunculan aliansi trilateral AUKUS dan revitalisasi QUAD merupakan respons sistemik penyeimbangan keras (hard external balancing) yang rasional oleh Amerika Serikat dan sekutunya dalam menghadapi ancaman pergeseran hegemoni akibat ekspansionisme militer Tiongkok di Indo-Pasifik. Kegagalan institusionalisme multilateral ASEAN yang inklusif untuk menghasilkan mekanisme penangkalan kredibel terhadap asertivitas Beijing di Laut Tiongkok Selatan mendorong kekuatan-kekuatan besar mendirikan format aliansi terbatas yang beranggotakan sedikit negara, berbasis kapabilitas tempur riil, dan beroperasi melompati institusi ASEAN.

Kedua, fenomena minilateralisme ini telah memperparah spiral dilema keamanan (security dilemma) di kawasan Asia Tenggara. Pengadaan kapal selam serang bertenaga nuklir oleh Australia di bawah AUKUS memicu perlombaan senjata asimetris, meningkatkan potensi bahaya proliferasi bahan bakar nuklir berkadar senjata melalui celah regulasi IAEA, serta mengancam stabilitas selat-selat strategis di perairan Indonesia (ALKI) yang bertransformasi menjadi koridor transit operasi kapal selam perang adidaya. Situasi ini menggerogoti efektivitas Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) sebagai instrumen penjaga netralitas kawasan.

Ketiga, sentralitas ASEAN mengalami proses marginalisasi fungsional (functional marginalization). Meskipun ASEAN secara seremonial tetap diakui sebagai fasilitator pertemuan diplomatik tingkat tinggi melalui instrumen normatif seperti AOIP, gravitas penentu keputusan keamanan arsitektur kawasan yang sebenarnya telah berpindah ke tangan format-format minilateral. ASEAN terancam tereduksi perannya menjadi sekadar forum wicara diplomatik yang tidak berdaya saat eskalasi militer riil meletus di perairannya sendiri. Keempat, disparitas respons di antara negara-negara anggota ASEAN berhasil dijelaskan secara kokoh melalui lensa Realisme Neoklasik. Tekanan sistemik anarkis internasional tidak melahirkan tanggapan yang seragam karena disaring oleh variabel intervensi di tingkat domestik masing-masing negara. Polarisasi yang tajam antara negara kepulauan penjaga tradisi netralitas (Indonesia dan Malaysia), negara pengklaim yang mencari payung penangkal militer terdepan (Filipina), negara kota yang mengandalkan pertimbangan pragmatis (Singapura), serta negara daratan yang terkunci dalam subordinasi ekonomi Tiongkok (Kamboja dan Laos) telah menghancurkan solidaritas internal ASEAN (ASEAN Unity) dari dalam.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya khazanah studi Hubungan Internasional dengan membuktikan signifikansi integrasi Neorealisme dan Realisme Neoklasik dalam menganalisis perilaku negara-negara berkembang (Global South). Neorealisme memberikan pemahaman makro mengenai tarikan gravitasi polaritas dan anarki global, sementara Realisme Neoklasik menyediakan instrumen mikroskopis untuk membongkar kotak hitam domestik, menjelaskan mengapa negara-negara di satu kawasan institusional yang sama dapat merespons pakta militer eksternal dengan strategi luar negeri yang saling bertentangan secara diametral. Secara praktis, hasil kajian ini memberikan sinyal peringatan mendesak bagi para perumus kebijakan luar negeri di Asia Tenggara bahwa masa kejayaan retorika normatif telah berakhir. Sentralitas ASEAN tidak dapat lagi dipertahankan semata-mata dengan mengandalkan mitos masa lalu mengenai keampuhan ASEAN Way.

Guna memitigasi risiko marginalisasi permanen dan mempertahankan otonomi strategis kawasan Asia Tenggara, artikel ini merumuskan empat rekomendasi kebijakan: Reformasi Mekanisme Pengambilan Keputusan ASEAN: ASEAN harus berani merevisi prinsip konsensus mutlak dalam penanganan isu-isu kedaulatan dan keamanan maritim yang mendesak. Pengadopsian mekanisme fleksibel, seperti formula "ASEAN Minus X", perlu diberlakukan untuk merumuskan respons bersama terhadap insiden maritim darurat, sehingga keterikatan satu atau dua negara anggota pada kekuatan eksternal tidak melumpuhkan aksi kolektif organisasi secara keseluruhan.

Operasionalisasi Konkret ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP): Mengubah AOIP dari sekadar dokumen panduan filosofis menjadi inisiatif strategis terikat (action-oriented framework) yang ditopang oleh pendanaan mandiri negara-negara anggota. Prioritas harus dialokasikan pada pembentukan sistem pemantauan maritim terpadu (ASEAN Maritime Domain Awareness Center) untuk mendeteksi intrusi kapal perang dan pergerakan armada kapal selam bawah air di perairan yurisdiksi Asia Tenggara. Penguatan Rezim SEANWFZ dan Diplomasi Verifikasi Nuklir AUKUS: Indonesia bersama Malaysia harus memimpin koordinasi diplomatik kawasan untuk menyusun protokol pengawasan ketat bersama IAEA yang mengikat Australia dan negara-negara anggota AUKUS, memastikan secara transparan bahwa alih teknologi propulsi nuklir tidak disalahgunakan untuk program senjata nuklir dan tidak mencemari lingkungan maritim perairan ALKI.

Implementasi Strategi Dynamic Hedging dan Omnienmeshment: Negara-negara anggota ASEAN harus menghindari jebakan keberpihakan biner antara Washington atau Beijing. ASEAN perlu memperluas diversifikasi kemitraan keamanan dan teknologi dengan kekuatan-kekuatan menengah independen lainnya (independent middle powers), seperti Uni Eropa, Korea Selatan, dan India, guna memperluas ruang manuver dan menjaga otonomi strategis kawasan dari cengkeraman hegemoni tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (3rd ed.). London: Routledge.

- Acharya, A. (2017). The Myth of ASEAN Centrality? *Contemporary Southeast Asia*, 39(2), 273–279.
- ASEAN Secretariat. (1976). *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*. Bangkok: 34th ASEAN Summit.
- Ba, A. D. (2009). [Re]Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations. Stanford: Stanford University Press.
- Bisley, N. (2018). The "Indo-Pacific" and the Uncertain Future of Asia's Regional Order. *Australian Journal of International Affairs*, 72(4), 312–320.
- Bitzinger, R. A. (2021). AUKUS, Nuclear Submarines, and Regional Security in Southeast Asia. S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Policy Brief, 1–6.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Emmers, R. (2010). *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia*. London: Routledge.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Goh, E. (2007). *Meeting the China Challenge: The Limits of Southeast Asian Hedging*. Washington, D.C.: East-West Center.
- Haacke, J. (2003). *ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects*. London: Routledge.
- He, K. (2008). Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and China's Rise versus the Western Order. *European Journal of International Relations*, 14(3), 489–518.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214.
- Kuik, C.-C. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia*, 30(2), 159–185.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company.
- Mearsheimer, J. J. (2019). Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order. *International Security*, 43(4), 7–50.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, 51(1), 144–172.
- Schweller, R. L. (2006). *Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power*. Princeton: Princeton University Press.
- Severino, R. C. (2006). *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community: Insights from the Former ASEAN Secretary-General*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Smith, S. (2022). AUKUS: Strategic Implications for the Indo-Pacific and ASEAN Centrality. *Asia Policy*, 17(2), 13–21.
- Snyder, G. H. (1984). The Security Dilemma in Alliance Politics. *World Politics*, 36(4), 461–495.
- Sukma, R. (2014). The ASEAN Political-Security Community: Challenges of Implementation. *Cambridge Review of International Affairs*, 25(2), 135–144.
- Tan, S. S. (2020). Consumed by Ambition? The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *The Diplomat*, June 2020.
- Tow, W. T. (2019). Minilateralism: A Redirection of Asian-Pacific Security? *Australian Journal of International Affairs*, 73(4), 317–324.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.
- Weatherbee, D. E. (2019). *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy* (3rd ed.). Lanham: Rowman & Littlefield.